

Skema IVE Model sebagai Stimulus Perekonomian Indonesia untuk Lolos dari Jebakan Pendapatan Menengah

Sartika N. Panjaitan^{1*}, Fanny Yolanda Tamba², dan Fransiska Situmorang³

¹²³Politeknik Keuangan Negara STAN

Email korespondensi*: sartikanovi6@gmail.com

INFORMASI

Diterima Pertama
16 Juli 2023

Dinyatakan Diterima
30 Desember 2023

ABSTRACT

MSMEs in Indonesia are still faced with various problems. One of the crucial problems is the need for MSMEs to prepare financial reports. The idea of the model emerged to answer this problem. IVE-Model is a certification scheme carried out by the government so that MSMEs can prepare financial reports. The involvement of various parties also determines the success of the IVE model. This scheme is expected to encourage MSMEs to be willing and able to prepare their financial reports. Therefore, as a significant pillar of the Indonesian economy, MSMEs can be a big hope for achieving the vision of a golden Indonesia 2045.

Keywords: MSMEs, Financial Reports, IVE-Model

ABSTRAK

UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah. Salah satu masalah yang krusial adalah ketidakmampuan UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Gagasan IVE-Model muncul untuk menjawab permasalahan ini. IVE-Model adalah skema sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah bagi UMKM agar mampu menyusun laporan keuangan. Keberhasilan IVE-Model juga ditentukan oleh keterlibatan dari berbagai pihak. Skema ini diharapkan dapat mendorong UMKM agar mau dan mampu menyusun laporannya. Oleh karena itu, UMKM sebagai tonggak besar perekonomian Indonesia dapat menjadi harapan besar bagi tercapainya visi Indonesia emas 2045.

Kata kunci: UMKM, Laporan Keuangan, IVE-Model

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan visi Indonesia 2045 yang disusun oleh Bappenas, Indonesia akan mengalami bonus demografi sekaligus mencapai masa keemasan di umurnya yang ke-100 tahun. Pencapaian ini diwujudkan melalui 4 pilar pembangunan, salah satunya pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dengan jumlah populasi kurang lebih 270 juta penduduk (World Bank, 2021) dan diprediksi akan terus meningkat, keadaan ini mengindikasikan bahwa diperkirakan jumlah penduduk usia produktif akan melampaui jumlah penduduk kurang produktif di masa depan. Potensi ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan dinamika ekonomi yang besar di pasar global.

Dalam mewujudkan harapan tersebut, banyak aspek yang perlu dibenahi, salah satunya adalah penguatan ekonomi secara berkelanjutan. Salah satu tantangan yang sedang membayangi Indonesia selama bertahun-tahun adalah jebakan pendapatan kelas menengah atau *middle income trap* (MIT). *Middle income trap* terjadi karena perkembangan ekonomi suatu negara yang cenderung stagnan, karena rendahnya kemampuan di bidang industri. Berdasarkan pendapat Gill dan Kharas (2007), *middle income trap* adalah kondisi di mana terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi setelah berhasil beralih dari kategori berpendapatan rendah (miskin) ke berpendapatan menengah. Berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh World Bank, GNI per kapita dibagi dalam 4 kategori, yaitu: *Low Income* (USD1.035), *Lower Middle Income* (USD1.036-USD4,045), *Upper Middle Income* (USD4.046-USD12.535) dan *High Income* (>USD12.535).

Tahun 2016-2019, rata-rata pendapatan nasional Indonesia tergolong pada *lower*

middle income, hingga pada tahun Juli 2020 Bank Dunia mengklasifikasikan pendapatan nasional Indonesia menjadi *upper middle income*, yaitu sekitar USD4.050. Indonesia sudah berada pada kondisi MIT ini selama kurang lebih 29 tahun (Suharso, 2022), cenderung lebih lama dibandingkan negara-negara lain.

Untuk menanggulangi tantangan ini, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dapat berperan sebagai *critical engine* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam catatan, peran UMKM sangat besar terhadap pergerakan ekonomi. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61% dan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari total tenaga kerja. Dalam jangka panjang, UMKM dapat menjadi kunci utama yang dapat membawa Indonesia keluar dari *middle income trap*.

Harapan kenaikan jumlah pendapatan nasional ini harus didukung dengan monitoring terhadap optimalisasi kinerja UMKM. Pencatatan transaksi dan laporan keuangan menjadi salah satu hal krusial yang harus diperhatikan. Namun, masih banyak UMKM yang belum melakukan pencatatan keuangan. Padahal, pencatatan laporan keuangan menjadi salah satu kunci untuk melakukan pengembangan usaha karena memudahkan pemantauan kinerja bisnis dan membantu mengambil keputusan strategis untuk pengembangan usaha. Sebuah survei membuktikan bahwa sejumlah 90% UMKM Indonesia tidak dapat bertahan selama 5 tahun karena tidak paham akuntansi, misalnya tidak memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis, tidak dapat mengatur *cash flow*, serta menjalankan bisnis dengan insting saja. Hal ini tidak terjadi di Indonesia saja, tapi 82% usaha kecil di negara Amerika Serikat juga gagal karena masalah dalam arus kas (Brian Sutter, 2023).

Middle income trap yang sedang dialami oleh Indonesia ini dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan eksistensi UMKM sebagai *critical engine*. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas standar kinerja salah satunya melalui optimalisasi pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik. Pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik akan membantu UMKM untuk mendapatkan pinjaman modal usaha, membantu dalam menyusun rencana bisnis, dan dapat menghitung kewajiban pajak yang akan dipenuhi. Hal inilah yang akan menjadi langkah nyata eskalasi pembangunan ekonomi Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Apa urgensi pembuatan laporan keuangan bagi UMKM?
- 1.2.2. Mengapa IVE-Model dapat menstimulus UMKM membuat laporan keuangan yang baik?
- 1.2.3. Bagaimana pengaruh ekonomi terintegrasi terhadap keluarnya Indonesia dari Middle Income Trap?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam menyusun kebijakan strategi optimalisasi kinerja UMKM yang lebih efisien dan efektif melalui penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi. Selain itu, dalam jangka panjang, strategi ini diharapkan dapat membawa Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* dengan UMKM sebagai kunci utama untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian ini antara lain:

- 1.4.1. Menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengupayakan pengoptimalan kinerja UMKM di Indonesia.
- 1.4.2. Menjadi rekomendasi strategi bagi UMKM dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis usahanya

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Masalah *Middle Income Trap* (MIT) yang Dihadapi Oleh Indonesia

Istilah *middle income trap* pertama kali populer pada laporan Bank Dunia yang dirilis pada tahun 2007 berjudul *An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth* yang mengacu pada keadaan ketika negara berhasil mencapai tahapan tingkat pendapatan menengah namun tidak berhasil keluar dan menuju tahap pendapatan maju. Negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah namun gagal mengatasi keterlambatan perekonomian untuk mengejar negara maju. Menurut pendapat Gill dan Kharas (2007), *middle income trap* merupakan suatu perekonomian yang mengalami penurunan dinamisme ekonomi yang tajam setelah berhasil bertransisi dari status berpenghasilan rendah ke menengah. Hal ini disebabkan karena negara tak mampu bersaing dengan negara berpenghasilan rendah yang bergantung pada sumber daya alam dan murahnya tenaga kerja dan tidak mampu bersaing dengan negara maju yang mengandalkan kualitas manusia dan teknologi tinggi.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa ancaman ini harus diatasi dengan *level of growth* ekonomi melalui produktivitas faktor kapital yang tinggi yaitu melalui inovasi dan efisiensi hingga penguatan anggaran prioritas dalam rangka

mendukung transformasi ekonomi. Indonesia harus memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6% pada 2040 agar terhindar dari *middle income trap* melalui reformasi struktural di Indonesia. Indonesia perlu mempersiapkan reformasi struktural yang tepat dengan pemberdayaan sektor manufaktur jangka panjang. Pemerintah telah berupaya terlepas dari middle income trap melalui perbaikan regulasi Indonesia seperti diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai aturan di bawahnya serta Sistem OSS (*One Single Submission*) yang merupakan bentuk reformasi struktural untuk mempercepat penyesuaian kondisi ekonomi di Indonesia saat ini.

Di tahun 2018, Indonesia masih berada di *lower-middle income*. Pada tahun 2020, Indonesia berhasil masuk ke tahap *upper-middle income*. Namun, per 1 Juli 2021, Bank Dunia menurunkan kembali status kelas Indonesia dari *upper-middle income country* menjadi *lower-middle income country*. Penurunan ini disebabkan karena Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan nasional bruto. Beruntungnya, pada 2022, pendapatan per kapita Indonesia yang mencapai US\$4.738,9 berhasil mengantarkan Indonesia masuk dalam klasifikasi *upper-middle income country*.

Menurut *Globalization, Productivity, and Production Networks in ASEAN: Enhancing Regional Trade and Investment*, untuk bisa keluar dari *middle income trap*, Indonesia minimal harus mampu mencapai angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% hingga 2030. Hal tersebut dapat dicapai melalui peningkatan ekspor dan investasi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu, Indonesia

harus memiliki angka pertumbuhan ekspor sekitar 9,8% per tahun dan nilai total investasi sebanyak Rp 35 ribu triliun hingga 2024 yang 10% diantaranya berasal dari pemerintah dan sisanya dari pihak swasta.

2.2. UMKM sebagai Kunci bagi Indonesia untuk Keluar dari Middle Income Trap

Pada pembahasan sebelumnya, dijelaskan bahwa indikator agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap adalah Indonesia harus mampu menaikkan Pendapatan Nasional Bruto nya. Besarnya PDB mempengaruhi perhitungan PNB di Indonesia. Saat ini kontributor terbesar untuk PDB Indonesia adalah UMKM yakni hingga lebih dari 60%. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah sering disebut sebagai *critical engine* bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dimaknai bahwa UMKM menjadi mesin pergerakan sebagian besar perekonomian Indonesia. Definisi terkait UMKM di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

UU 20/2008 menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU (Pasal 1). Kemudian, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Sementara itu, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan: Berdasarkan Undang Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kriteria UMKM adalah sebagai berikut.

1. Kriteria Usaha Mikro

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan yang diperoleh paling banyak Rp300 Juta.

2. Kriteria Usaha Kecil

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 Juta sampai paling banyak Rp500 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan yang diperoleh lebih dari Rp300 juta sampai paling banyak Rp2,5 M.

3. Kriteria Usaha Menengah

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 Juta sampai paling banyak Rp10 M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan yang diperoleh lebih dari Rp2,5 M sampai paling banyak Rp50 M.

Selain itu, UMKM juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat perkembangannya yaitu antara lain:

a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.

b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

2. 3. UMKM Menghadapi Masalah Pencatatan dan Manajemen Keuangan

Pada umumnya, UMKM melakukan pencatatan keuangan yang sederhana seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Bahkan, ada juga yang tidak melakukan pencatatan keuangan terhadap kegiatan usahanya. Selain itu, pencatatan sederhana yang dilakukan biasanya tidak memperhitungkan beban lain, seperti beban depresiasi dan beban sewa untuk gedung dan aset yang digunakan dalam menjalankan aktivitas usaha. Sehingga, jumlah laba yang dilaporkan tidak akan mencerminkan nilai sesungguhnya (*overstated/understated*).

Permasalahan pencatatan dan manajemen keuangan menjadi masalah yang sangat lazim ditemui di UMKM. Hal ini disebabkan karena rendahnya literasi, pelatihan, dan kesadaran akan pelaporan keuangan yang baik. Banyak pelaku usaha menjalankan usahanya dengan pencatatan keuangan secara manual dan bahkan ada yang hanya memperkirakan berdasarkan insting. Sebenarnya, pencatatan keuangan manual adalah langkah awal yang baik bagi UMKM dalam mempelajari arus keuangan dalam usahanya. Akan tetapi, pelaporan keuangan secara manual memiliki beberapa kekurangan seperti pencatatan yang kurang akurat, keterbatasan ruang dan waktu, serta cenderung akan dipengaruhi oleh *human error*.

Oleh karena itu, transformasi pencatatan dan penyusunan laporan keuangan digital menjadi jalan keluar keterbatasan pencatatan manual. Hingga akhir tahun 2022, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merilis jumlah UMKM yang sudah terdaftar dalam website Kemenkop adalah sekitar 21 juta dari total 64 juta UMKM. Data ini adalah data yang berhasil diinventarisasi belum termasuk usaha-usaha yang belum mendaftarkan usahanya dalam sistem digitalisasi tersebut.

3. METODE PENELITIAN

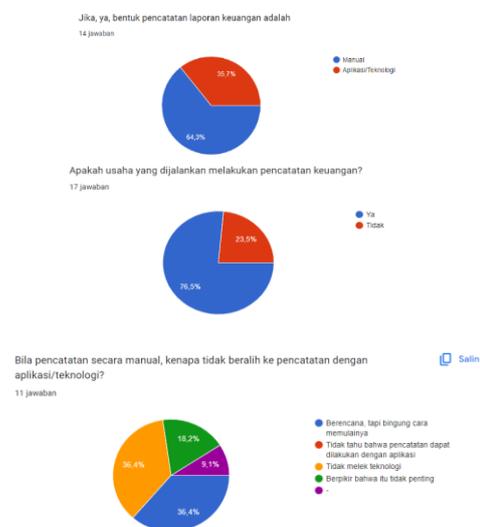
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan melakukan studi literatur dan survei. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data melalui buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data sampel beberapa UMKM.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Urgensi pembuatan laporan keuangan bagi UMKM

Sejak bertahun-tahun, pemerintah Indonesia secara khusus Kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berkomitmen untuk mendorong transformasi pencatatan dan laporan keuangan menggunakan bantuan teknologi digital. Berbagai upaya dilakukan mulai dari seminar, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat, pembuatan *website* terpadu untuk mendata perkembangan UMKM, hingga peluncuran aplikasi berbasis digital dalam proses pembuatan catatan transaksi dan laporan keuangan. Upaya-upaya ini dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta.

Pada tanggal 7-12 Mei 2023 dilakukan survei terhadap 16 UMKM mengenai penyusunan laporan keuangan sederhana. Berikut adalah diagram hasil survei tersebut.



Gambar 4. 1 Hasil Survei

Survei tersebut menunjukkan bahwa 76,5% UMKM sudah melakukan pencatatan dan sebesar 64,3% masih melakukan pencatatan secara manual. Beberapa alasan diantaranya adalah 36,4% menyatakan 'tidak melek teknologi', 36,4% 'berencana tapi bingung cara memulainya', dan 18,2% 'menyatakan bahwa itu tidak penting'. Studi literatur lainnya juga menyatakan bahwa faktor utama yang membuat UMKM sulit berkembang dan bahkan

tidak dapat bertahan di pasar adalah kurangnya kesadaran untuk melakukan pencatatan dan “kebutaan” untuk melakukan pencatatan itu sendiri.

Saat memulai sebuah bisnis, angka-angka pada laporan keuangan sudah seharusnya menjadi hal yang harus diperhatikan demi pertumbuhan bisnis (Vikrie Ferdiansyah, 2022). Di Indonesia sendiri, dokumen terkait pengaturan pembuatan laporan keuangan bagi usaha-usaha di Indonesia belum diatur. Ini berdampak pada rendahnya kesadaran terkait urgensi penyusunan laporan keuangan bagi sebuah usaha. Sehingga, banyak UMKM yang menjalankan proses bisnis usahanya berdasarkan insting semata dan kurang tertarik untuk beralih ke pencatatan berbasis digital. Kurang andalnya suatu laporan keuangan memicu banyak hambatan bagi UMKM untuk dapat berkembang, yaitu:

1. Pendapatan usaha dan laba yang sulit untuk mengalami peningkatan

Pelaku usaha yang kurang memperhatikan pencatatan dan pelaporan keuangan usahanya, cenderung melakukan kesalahan dengan tidak memisahkan kekayaan pribadi dengan perusahaan. Selain itu, dalam pencatatan manual, pemilik usaha cenderung hanya melakukan pencatatan terhadap biaya tenaga kerja dan bahan baku yang berdampak langsung pada pembuatan produk tanpa menghitung biaya lain, seperti depresiasi aset dan/atau beban lainnya.

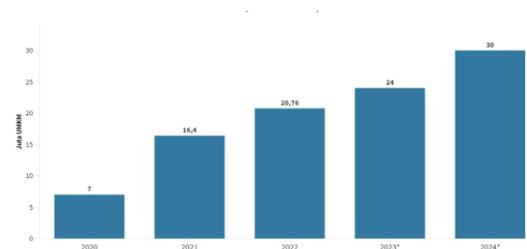
2. Pelaku usaha tidak dapat menentukan strategi bisnis dengan tepat

Pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik adalah salah satu kunci untuk mendeteksi sehat tidaknya suatu bisnis. Dengan laporan keuangan yang lengkap, pelaku usaha dapat melihat perkembangan laba-rugi, menilai arus kas bisnis, dan mendeteksi pengeluaran-pengeluaran yang berpotensi merugikan. Selain itu, dengan melihat arus keuangan, pelaku usaha dapat menentukan strategi bisnis yang tepat sesuai dengan kondisi usaha dan perkembangan pasar.

3. Terbatasnya akses terhadap sumber modal usaha

Laporan keuangan merupakan cerminan dari proses bisnis dalam suatu usaha. Hal inilah yang menjadi pertimbangan lembaga-lembaga penyedia modal maupun kreditur dalam memberikan pinjaman modal bagi suatu usaha. Laporan keuangan manual dan kurang rapi akan membatasi akses permodalan bagi UMKM sedangkan bila dengan rapi akan memudahkan UMKM mendapatkan akses modal usaha. Banyak UMKM sulit untuk berkembang menjadi usaha yang lebih besar karena rendahnya akses penyaluran kredit. Hal ini disebabkan rendahnya kapasitas pelaku UMKM untuk melakukan pengelolaan keuangan dan minimnya literasi keuangan.

Hingga saat ini, jumlah UMKM yang sudah yang sudah terdaftar pada situs KemenkopUKM per akhir tahun 2022 adalah sekitar 21 juta UMKM atau sekitar 32% dari 64 juta total UMKM di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada setengah dari jumlah seluruh UMKM di Indonesia yang memanfaatkan teknologi. Jumlah UMKM yang masuk ekosistem digitalisasi:



Gambar 4. 2 UMKM yang Masuk Sistem Digitalisasi

Pemerintah terus berupaya agar jumlah UMKM yang memanfaatkan teknologi semakin meningkat. Pada tahun 2023, angka ini diperkirakan akan naik menjadi 24 juta dan ditargetkan mencapai 30 juta UMKM terdigitalisasi pada tahun 2024.

4.2. IVE-Model menstimulasi UMKM dalam membuat laporan keuangan yang baik

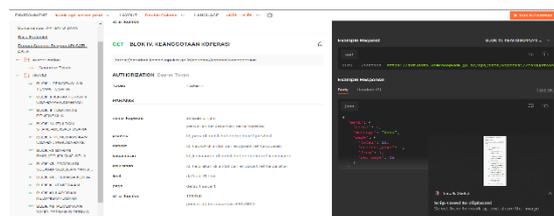
Dalam transformasi digitalisasi UMKM di Indonesia, khususnya dalam pembuatan laporan keuangan, banyak pihak baik dari pemerintah maupun swasta sudah melakukan berbagai inovasi teknologi keuangan yang dapat membantu UMKM. Hal ini ditandai dengan kemunculan berbagai aplikasi dan situs yang dapat membantu UMKM untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang baik maupun dalam mengintegrasikan data seluruh UMKM di Indonesia. Salah satu situs yang sudah diluncurkan pemerintah adalah KemenkopUKM yaitu situs yang mengintegrasikan data UMKM di Indonesia dalam satu data. Contoh lainnya adalah aplikasi Siapik, yaitu aplikasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka membantu pelaku UMKM dapat melakukan pencatatan keuangan sederhana.

a. KemenkopUKM

Saat ini, pemerintah telah membangun program basis data tunggal bernama KemenkopUKM sebagai tindak lanjut dari UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur kemudahan usaha bagi UMKM melalui pengembangan basis data tunggal. Data UMKM yang akan dimuat dalam sistem ini akan meliputi identitas pelaku usaha, identitas badan usaha, karakteristik usaha, sumber daya manusia, proses produksi, pemasaran, hingga status keuangan. Program basis data tunggal UMKM sendiri merupakan bagian dari program Satu Data Indonesia yang digagas oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang bekerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, dan swasta.



Gambar 4. 3 Tampilan Depan Kemenkop UKM



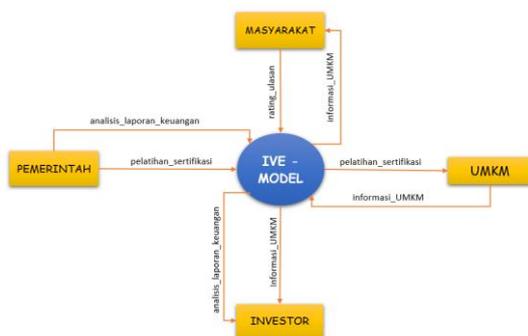
Gambar 4. 4 Tampilan 12 Data UMKM

Program basis data tunggal ini menyajikan berbagai informasi mengenai UMKM yang hanya dapat diakses oleh pengusaha UMKM. Kepala Bidang Pendampingan Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Adi Daen Fahmi, menyampaikan bahwa para wirausaha muda akan diberikan bantuan modal awal untuk berbisnis. Beliau juga mengatakan bahwa pengusaha akan diberikan pembekalan pengetahuan mengenai pasar bisnis yang tepat. Kedua hal ini dapat menjawab kesulitan UMKM dalam menjalankan bisnisnya, yakni masalah permodalan dan kurangnya inovasi dalam menemukan pasar bisnis. Walaupun telah diberikan insentif demikian, tidak banyak UMKM yang dapat menyusun laporan keuangan pada menu KemenkopUKM. Berikut adalah jumlah UMKM yang terdaftar berdasarkan KemenkopUKM per 02 Februari 2023

Banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang dapat membuat laporan keuangan dengan baik. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, A.H. Novieta, menyampaikan bahwa sebanyak 77,5% UMKM tidak memiliki laporan keuangan. Padahal menurut survei sekitar 90% UMKM yang tidak mampu bertahan lebih dari 5 tahun di industri disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memahami akuntansi dengan baik. Penyusunan laporan keuangan memang bukan perkara mudah bagi pengusaha UMKM. Namun, hal ini menjadi sangat penting bagi keberlangsungan hidup UMKM. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme yang "mengharuskan" seluruh UMKM menyusun laporan keuangan dengan baik.

b. Implementasi IVE-Model pada KemenkopUMK

Sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengharuskan UMKM mencatatkan laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena masih banyak UMKM yang tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun laporan keuangan. Di sisi lain, masih banyak UMKM yang menganggap bahwa penyusunan laporan keuangan terlalu merepotkan dan tidak berpengaruh besar pada keuntungan usaha. Pemerintah tidak dapat memaksa UMKM menyusun laporan keuangan. Namun, diperlukan cara agar UMKM mau dan mampu menyusun laporan keuangan karena dianggap harus dan menguntungkan bagi UMKM. Hal inilah yang memunculkan gagasan IVE-Model. Berikut adalah *data flow diagram* IVE-Model.



Gambar 4. 5 Data Flow Diagram IVE-Model

IVE-Model adalah sebuah skema yang akan membuat UMKM tersertifikasi oleh pemerintah atas dasar kemampuan menyusun laporan keuangan, yang dibagi atas 3 tahapan utama, yakni Inventarisasi - Verifikasi - Evaluasi. Tahapan IVE-Model adalah sebagai berikut:

1. UMKM mendaftarkan usahanya pada laman KemenkopUMK (**INVENTARISASI**)
 Inventarisasi merupakan tahap UMKM dapat mendaftarkan usahanya di laman KemenkopUMK. Pada laman awal KemenkopUMK, akan terdapat menu UMKM. Jika mengklik menu UMKM akan terdapat dua pilihan yakni **Daftar** atau **Login**. Untuk UMKM yang sudah memiliki akun terdaftar, maka UMKM dapat **Login** dengan memasukkan **Nama Pengguna** dan **Kata Sandi** yang sudah

didaftarkan. Jika belum, maka UMKM dapat memilih menu **Daftar**.

Pada menu **Daftar**, UMKM akan diarahkan untuk melewati beberapa proses pendaftaran dan mengisi sejumlah data yang diperlukan. Tahap akhir dari proses pendaftaran adalah tahap **Kunci Data**. Setelah alur pendaftaran terlewati, UMKM dapat *login* kembali dengan akun yang sudah terdaftar. Untuk UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi maka akan terdapat ceklis berwarna hijau di samping nama akun UMKM dan akan tertera waktu batas berlakunya sertifikasi tersebut. Jika UMKM belum mendapatkan sertifikasi, maka akan terdapat menu "**Ambil Sertifikasi**".

2. UMKM mendapatkan pelatihan dan sertifikasi (**VERIFIKASI**)

Pada menu **Ambil Sertifikasi**, UMKM akan diberikan sejumlah informasi mengenai jadwal dan lokasi terdekat untuk pelatihan dan sertifikasi. Adapun untuk contoh jadwal pelatihan adalah sebagai berikut.

Gelombang	Tanggal berlangsung (2023)
Satu	15 Februari - 15 Maret
Dua	15 Mei - 15 Juni
Tiga	15 Agustus - 15 September
Empat	15 November - 15 Desember

Gambar 4. 6 Jadwal Pelatihan

Sertifikasi dapat dilakukan secara gratis oleh seluruh UMKM. Untuk pelaksanaan akan dilaksanakan secara *offline* dan *online*. Pelaksanaan secara *offline* dapat diselenggarakan di tempat terdekat domisili pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Indikator kesuksesan dari pelatihan ini adalah UMKM mampu menyusun laporan keuangan secara sederhana yang disampaikan paling lama pada tanggal :

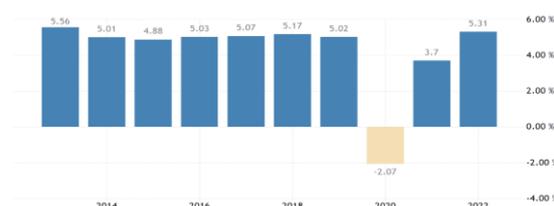
1. Gelombang Satu : 31 Maret tahun berjalan
2. Gelombang Dua : 30 Juni tahun berjalan
3. Gelombang Tiga : 30 September tahun berjalan
4. Gelombang Empat: 31 Desember tahun berjalan

membutuhkan keterlibatan banyak pihak, yaitu pemerintah, lembaga keuangan, UMKM, konsumen, investor, dan sebagainya. Hal ini akan memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan skala produksi dan pendapatannya. Dengan kontribusi UMKM yang semakin besar akan mewujudkan ekonomi terintegrasi, dan hal ini juga akan memberikan *domino effect* terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dari *middle income* menjadi *high income* yang dapat dilihat dalam beberapa hal berikut ini.

- a. Adanya peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM. Dengan adanya program pelatihan UMKM, sertifikasi UMKM, dan sistem *rating*, UMKM akan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Hal ini akan berdampak positif pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan karena UMKM merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia.
- b. Adanya peningkatan ekspor dan daya saing internasional. Dengan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas UMKM melalui *branding* yang dilakukan oleh pemerintah, maka UMKM dapat menarik perhatian perusahaan besar dan investor untuk menjadikan UMKM sebagai mitra untuk proses produksinya. Selain itu, Indonesia juga akan menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Hal ini akan membantu Indonesia memperkuat integrasi ekonominya di dalam negeri maupun dengan negara-negara lain, sehingga membantu Indonesia keluar dari *middle income trap*.
- c. Adanya peningkatan pertumbuhan di sektor industri dan manufaktur. Dengan adanya pengoptimalan dan pengembangan UMKM, sektor industri dan manufaktur di Indonesia akan berkembang secara signifikan karena hal ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari statistik

PDB dalam sepuluh tahun terakhir yaitu sebagai berikut.



Gambar 4. 12 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 10 tahun terakhir

Menurut statistik pertumbuhan perekonomian Indonesia tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia hanya berada di sekitar angka 3%-5%. Menurut Yudhistira, bahwa untuk dapat keluar dari *Middle Income Trap*, setidaknya sampai pada tahun 2045 minimal pertumbuhan perekonomian Indonesia harus berada pada angka 8%-9% setiap tahunnya. Jika kontribusi UMKM terhadap PDB setiap tahun dapat meningkat dengan adanya IVE-Model ini maka Indonesia dapat keluar dari *Middle Income Trap*. UMKM dengan kontribusi yang besar yaitu mencapai sebesar 61% terhadap PDB dan mampu menyerap 97% tenaga kerja akan berpengaruh pada banyak aspek ekonomi di Indonesia sehingga dengan pengoptimalan UMKM melalui IVE-Model ini diharapkan mampu menjadi kunci untuk Indonesia keluar dari kondisi *Middle Income Trap*.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Cita-cita yang besar dapat diraih dengan usaha yang besar pula, termasuk visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara maju. Hal tersebut membutuhkan banyak pembenahan di berbagai sektor, salah satunya adalah tingkat kemajuan dan pemerataan ekonomi. Masalah ekonomi yang membayangi Indonesia selama bertahun-tahun adalah *middle income trap* atau jebakan pendapatan menengah, yaitu ketika pendapatan nasional Indonesia tak kunjung keluar dari tingkat pendapatan menengah setelah keluar dari pendapatan kelas bawah. UMKM sebagai

critical engine memainkan peranan yang penting untuk mendorong Indonesia keluar dari *middle income trap* karena dinilai memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, bersifat resilien, dan merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap PDB, yaitu sekitar 61%. Kontribusi terhadap PDB ini juga akan berdampak secara langsung terhadap jumlah PNB yang menjadi indikator tingkat pendapatan. Akan tetapi, UMKM juga menghadapi masalah dalam optimalisasi kinerja usaha, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang baik. Sebagian besar UMKM sudah melakukan pencatatan keuangan secara manual dan tidak sedikit juga yang belum melakukan pencatatan. Kondisi ini berdampak pada UMKM yang sulit untuk bertahan dan berkembang. IVE-Model yang lahir dari analisis terhadap situs KemenkopUKM dan aplikasi Siapik menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini. IVE-Model adalah skema yang mengharuskan UMKM tersertifikasi oleh pemerintah atas dasar kemampuan menyusun laporan keuangan, yang dibagi atas 3 tahapan utama, yakni Inventarisasi-Verifikasi-Evaluasi. IVE-Model menjadi jawaban untuk dua masalah sekaligus, yakni menstimulasi peningkatan kapasitas dan kualitas penyusunan laporan keuangan UMKM dan mengintegrasikan seluruh UMKM di Indonesia terhubung dengan konsumen, investor, dan pemerintah sekaligus.

5.2. Saran

Strategi optimalisasi kinerja UMKM dengan IVE-Model ini masih perlu dikaji dan dikembangkan lebih dalam lagi. Model ini masih membutuhkan analisis biaya-manfaat (*cost-benefit*) agar pemanfaatan model ini dapat lebih efisien. Kemudian, kerja sama dibutuhkan antara pemerintah dan lembaga terkait dalam menjamin keamanan data UMKM. Selain itu, diperlukan kepastian hukum untuk mengatur pengembangan model ini.

DAFTAR PUSTAKA

Antoro, T. (2023, Februari 06). *InfoPublik*. Retrieved from Presiden: Indonesia Kembali Jadi Negara Upper-Middle

Income:

<https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/708802/presiden-indonesia-kembali-jadi-negara-upper-middle-income>

Azzahra, B., & Wibawa, I. G. A. R. P. (2021). Strategi optimalisasi standar kinerja UMKM sebagai katalis perekonomian indonesia dalam menghadapi middle income trap 2045. *Inspire Journal: Economics and Development Analysis*, 1(1), 75-86.

Irwansyah, M. R. (2021). EKUITAS. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1-13.

Kementerian Koperasi dan Kecil dan Menengah yang diolah dari data. (2018). *PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB) TAHUN 2017-2018*. Badan Pusat Statistika.

Kementerian Koperasi dan UMKM. (2021, June). Menutup Celah Cross-Border, Melindungi UMKM. *PROGRAM ADAPTASI DAN TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL*, pp. 1-42.

Muhammad Azman, H. F. (2021). MODEL PEMBERDAYAAN UMKM DENGAN PENDEKATAN KOLABORASI ABGC SEBAGAI STRATEGI KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP. *INSPIRE JOURNAL : Economics and Development Analysis*, 1-14.

Muhammad Rafi Bakri, d. (2022). USAHA PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA DI MASA PANDEMI. *BUNGA RAMPAI*, 130.

NUR ROKHMAN S.ST., M. (2022, Februari 22). *UNIVERSITAS STEKOM*. Retrieved from Masih Banyak Pelaku UMKM Buta Akuntansi Dan 90% UMKM Tidak Bertahan Lama Karena Tak Paham Akuntansi: <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Masih>

- [-Banyak-Pelaku-UMKM-Buta-Akuntansi-dan-90-UMKM-Tidak-Bertahan-Lama-Karena-Tak-Paham-Akuntansi/ed573491383d5d7052276dd09beebea1637ac2a3](#)
- Pratama, A. M. (2021, Agustus 4). *Kompas.com*. Retrieved from Apa yang Dimaksud Dengan Middle Income Trap?: <https://money.kompas.com/read/2021/08/04/170000126/apa-yang-dimaksud-dengan-middle-income-trap?page=all>
- Siregar, P. S., Mersi, W. J., & Putri, S. H. (2021). Umkm kunci indonesia keluar dari middle income trap. *Inspire Journal: Economics and Development Analysis*, 1(1), 87-98.
- Wa Ode Rayyani, M. N. (2020). PENINGKATAN DAYA SAING UMKM MELALUI OPTIMALISASI . *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 1-9.
- Wardi, Jeni and Putri, Gusmarika Eka and Iviawati, Iviawati (2020) Pentingnya Penerapan Pengelolaan Keuangan Bagi UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. ISSN 1829-9822
- Yusuf, M. F. (2023, Maret 13). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Retrieved from Indonesia Harus Keluar dari Ancaman Middle Income Trap: <https://setkab.go.id/indonesia-harus-keluar-dari-ancaman-middle-income-trap/>